BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan melakukan wirausaha. Banyak cara untuk menjadi seorang wirausahawan, antara lain dengan mendirikan bisnis baru ataupun membeli sistem bisnis yang telah ada dan telah berjalan. Saat ini banyak orang yang memulai usaha dengan cara membeli sistem bisnis atau yang dikenal dengan istilah *franchisee* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan waralaba, waralaba merupakan kegiatan usaha penjualan barang secara retail.¹ Waralaba adalah suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenai bisnis di bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek, bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional.²

Waralaba merupakan salah satu peluang untuk menjadi wirausaha, yang pada akhir-akhir ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sedang berkembang. Warren J. Keegen mengatakan: “Bahwa pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional dapat melakukan

¹ Abdulkadir Muhammad, 2020, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 335

² Rooseno Hardjowidigdo, 1993, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise*, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Jakarta, hlm. 5

beberapa macam pilihan cara, salah satunya adalah melakukan pemberian waralaba.”³

Bisnis waralaba pada dasarnya adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, sedangkan para pihak di dalam bisnis waralaba tersebut terdiri dari pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Pemberi waralaba adalah badan usaha perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki, sedangkan penerima waralaba adalah badan usaha/perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.

Untuk mengatur waralaba ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yang memberikan perumusan secara jelas sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 yaitu:

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usahaterhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barangdan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakanoleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
2. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikanhak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepadaPenerima Waralaba.
3. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hakoleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yangdimiliki Pemberi Waralaba.

³ Warren J. Keegen, 2001, *Gloobal Marketing, Management*, Dalam Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Waralaba pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara cepat. Waralaba bukanlah sebuah alternatif melainkan salah satu cara yang sama kuat dan strategis dengan cara konvensional dalam mengembangkan usaha. Bahkan sistem waralaba dianggap memiliki banyak kelebihan terutama menyangkut pendanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen. Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumennya melalui tangan-tangan penerima waralaba.⁴

Legalitas keberadaan waralaba baru dikenal di Indonesia sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 Tentang Waralaba. Disusul dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Waralaba didasarkan pada suatu perjanjian waralaba sebagaimana diatur di dalam pasal 4 pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang berbunyi “Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia”.

⁴ Majalah Info Franchise, www.majalahfranchise.com, diakses pada tanggal 16 November 2020

Dengan adanya perjanjian waralaba maka akan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Sehingga perjanjian waralaba ini menjadi suatu pedoman hukum bagi pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) yang harus dipatuhi. Setiap pemberi waralaba memiliki standar perjanjian untuk disepakati bersama dengan penerima waralaba yang tentunya dapat saling menguntungkan bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba.⁵

Perjanjian tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia tentang waralaba. Mengingat bahwa perjanjian waralaba adalah Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka hubungan hukum para pihak yang akan menjalankan usahanya sangat ditentukan oleh perjanjian waralaba itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Jaya Fried Chicken atau yang lebih dikenal dengan sebutan JFC merupakan salah satu perusahaan waralaba di Bali yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan cepat saji. I Made Agus Putra Jaya yaitu pria kelahiran Buleleng pada tanggal 16 Januari 1979 merupakan pemilik waralaba sekaligus pendiri *brand* Jaya Fried Chicken yang berdiri sejak tahun 2015. Hingga saat ini, Jaya Fried Chicken telah memiliki lebih dari 200 gerai di seluruh Bali dengan menu unggulan berupa ayam.⁶

Jaya Fried Chicken Cabang Kebon Singapadu merupakan salah satu dari sekian gerai JFC yang tersebar di seluruh Bali. Adapun pemilik Jaya

⁵ Cindi Pratiwi Kondo, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Pemutusan Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Lex et Societatis, hlm 62

⁶ Sejarah JFC, <https://jfcBALI.com/sejarah-jfc/>, diakses pada tanggal 09 Februari 2021

Fried Chicken Cabang Kebon Singapadu sekaligus penerima waralaba dari *brand* Jaya Fried Chicken adalah Ni Made Sanjani Widiastuti. Jaya Fried Chicken Cabang Kebon Singapadu resmi dibuka pada September 2020. Dalam pelaksanaan usaha ini, Jaya Fried Chicken Cabang Kebon Singapadu memiliki 5 pegawai yang terbagi menjadi dua shift setiap harinya.

Waralaba dilakukan oleh para pihak tentunya dengan menggunakan perjanjian. Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual, namun demikian terdapat perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan suatu tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan, sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut dianggap sah.⁷

Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh pemberi waralaba (*franchisor*) untuk para penerima waralaba (*franchisee*). Pada perjanjian waralaba tercantum ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba, ketentuan yang berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya, serta ketentuan lain yang mengatur hubungan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.⁸

Dalam pembuatan perjanjian waralaba seringkali pihak pemberi waralaba tidak melibatkan penerima waralaba sehingga terdapat ketimpangan

⁷ Gemala Dewi, dkk, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.175-176

⁸ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 79

dalam hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi waralaba menetapkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh penerima waralaba. Ketidakmampuan atau kegagalan dalam memenuhi persyaratan yang diberikan, misalnya, tidak memenuhi kuota penjualan atau standar operasi, dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pemberi waralaba.

Sebagian besar perjanjian waralaba lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi kepentingannya pemberi waralaba dan kurang memperhatikan perlindungan hukum bagi pihak penerima waralaba. Karena dalam setiap perjanjian waralaba, pihak pemberi waralaba cenderung mendominasi terkait klausula-klausula yang terdapat di dalam perjanjian ketimbang pihak penerima waralaba itu sendiri.

Pentingnya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan pengawasan agar para pihak yang terlibat khususnya pihak penerima waralaba merasa terlindungi. Dengan adanya perlindungan hukum yang dijamin oleh pemerintah, diharapkan agar penerima waralaba memiliki rasa aman saat melakukan perjanjian waralaba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba kedalam sebuah karya tulis dengan judul ***“Perlindungan Hukum terhadap Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba (Studi Kasus di Jaya Fried Chicken Cabang Kebon Singapadu)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba pada Jaya Fried Chicken Cabang Kebon Singapadu?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima waralaba Jaya Fried Chicken Cabang Kebon Singapadu apabila muncul gugatan dari pihak ketiga sebagai konsumen atas produk yang dibelinya?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain mengenai pelaksanaan perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam perjanjian waralaba, yang diantaranya membahas mengenai hak dan kewajiban antara penerima waralaba dengan pemberi waralaba di Jaya Fried Chicken Cabang Kebon Singapadu serta mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba JFC (Jaya Fried Chicken) Cabang Kebon Singapadu apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga sebagai konsumen atas produk yang dibelinya.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat secara tertulis, sistematis, dan objektif.
2. Sebagai sarana untuk menuangkan ide dari mahasiswa agar berpikir kreatif
3. Sebagai sarana untuk memantapkan pengetahuan mahasiswa dalam studi hukum.
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukumdi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba di Jaya Fried Chicken Cabang Kebon Singapadu yang mencakup hak dan kewajiban bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam menjalankan perjanjian waralaba.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima waralaba di Jaya Fried Chicken Cabang Kebon Singapadu apabila terjadi gugatan atau keluhan dari pihak ketiga sebagai konsumen atas produk yang dibelinya.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum, dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang di dilakukan oleh mahasiswa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang dikaji serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang Perlindungan Hukum terhadap Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba.

1.6. Kerangka Teori dan Hipotesis

1.6.1. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian,

perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus

⁹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Maret 2021

hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹²

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

¹¹ *Ibid*, hlm. 69

¹² Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³

2. Konsep Hukum Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subketi, "Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya."¹⁴

¹³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

¹⁴ Subketi, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm 111

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁵

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu¹⁶ :

- a) Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c) Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

¹⁵ Purwahid Patrik, 1988. *Hukum Perdata II*. Undip: Semarang, hlm.1

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4

- e) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Dalam suatu perjanjian terdapat asas-asas hukum perjanjian yang harus dipegang bagi para pihak yang mengikatkan diri ke dalam hubungan hukum perjanjian. Berikut ini adalah asas-asas hukum utama dalam melakukan suatu perjanjian :

1. Asas Sepakat (Konsensualitas)

Asas konsensualitas, artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Jadi perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Terhadap asas konsensualitas ini terdapat pengecualian, yakni adanya perjanjian Riil, Misalnya:

- a. Perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata)
- b. Perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata)
- c. Perjanjian pinjam pakai sampai habis (Pasal 1754 KUH Perdata)

Asas konsensualitas ini dapat kita simpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat. Karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah

atau mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹⁷

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian yang terdapat dalam Undang-undang yang dikenal sebagai perjanjian bernama misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan kata “semua”, pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang. Jadi dalam hal perjanjian, para pihak diperbolehkan membuat Undang-Undang bagi para pihak itu sendiri.

Pasal-pasal yang ditentukan berlaku sepanjang para pihak tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang diadakan. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Selain itu, meskipun setiap orang bebas membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja,

¹⁷ Komariah, 2001, *Asas-Asas Perjanjian Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, hlm.143

namun isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁸

3. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).¹⁹

Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-

¹⁸ *Ibid*, hlm.144

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 128

syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.²⁰

4. Asas Kepastian Hukum

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini tertuang asas kepastian hukum, karena mengakui isi perjanjian sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang disebut dengan Undang-Undang dalam arti konkrit, yakni Undang-Undang yang lahir dari perjanjian dan hanya berlaku kepada para pihak dalam perjanjian.²¹

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.²²

6. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya

²⁰ *Ibid*

²¹ Komariah, 2001, *Asas-Asas Perjanjian Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, hlm.144

²² Merry T. J. Ruauw, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Dalam Perjanjian Franchise*, Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm.116

untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1320 KUH Perdata. Didalam Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.²³

1.6.2. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan uraian diatas terhadap permasalahan tersebut maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam perjanjian waralaba JFC (Jaya Fried Chicken) Cabang Kebon Singapadu adalah pemberi waralaba dan penerima waralaba menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan yang tertera pada perjanjian waralaba.
2. Perlindungan hukum bagi penerima waralaba JFC (Jaya Fried Chicken) Cabang Kebon Singapadu apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga sebagai konsumen atas produk yang dibelinya adalah pemberi waralaba ikut bertanggung jawab apabila produk yang dijual penerima waralaba menimbulkan gugatan dari pihak ketiga. Pihak pemberi waralaba tidak bisa lepas tangan begitu saja mengingat bahan baku makanan yang diolah oleh penerima waralaba bersumber dari pemberi waralaba itu sendiri.

²³ *Ibid*

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, atau hipotesa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atamelalui observasi langsung. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.²⁴

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum ditingkat masyarakat. Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan observasi langsung ke lapangan dalam hal ini di JFC (Jaya Fried Chicken) Cabang

²⁴ Muktifajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pusat Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153

Kebon Singapadu yang berhubungan dengan permasalahan pelaksanaan perjanjian bagi penerima waralaba dalam perjanjian waralaba serta perlindungan hukum bagi penerima waralaba apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga sebagai konsumen atas produk yang dibelinya.

1.7.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi dalam penelitian menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya. Seperti halnya namanya, sifat penelitian tersebut ialah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi. Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.²⁵

²⁵ Nurul Zuriyah, 2012, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 47

Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

1.7.3. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara yang bersifat *deep interview* (wawancara yang dilakukan secara mendalam) kepada informan yang mengetahui permasalahan yang dikaji.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan perundangan-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya. Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

a) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini adalah :

²⁶ Thalys Noor Cahyadi, 2013, *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan*, Jurnal Rechtsvinding, hlm. 20

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- c. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

b) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan penulis menggunakan hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian seperti jurnal, makalah, koran, dan bahan-bahan dari internet yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemberi waralaba dan penerima waralaba.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier diantaranya adalah:

- a. Ensklopedia;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Hukum.

Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipakai harus relevan dan mutakhir.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

- a. Terhadap data primer, pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dengan menggunakan sarana pedoman wawancara yang direkam dengan *tape recorder* lalu dicatat dalam buku. Wawancara dilakukan dengan penerima waralaba beserta pegawainya.
- b. Terhadap data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen yaitu dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan mengkaji tulisan-tulisan berupa buku, undang-undang, dokumen, *literature*, peraturan pemerintah, maupun tulisan lainnya. Tulisan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisa data yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

- c. Terhadap data tersier, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca tulisan-tulisan jurnal atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

1.7.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yang memberikan peran sangat besar pada peneliti untuk menentukan pengambilan sampelnya. Penarikan sampel yang digunakan dalam teknik penentuan sampel adalah dengan menggunakan bentuk *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Purposive sampling adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana didasarkan oleh pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi.

Snowball sampling merupakan penarikan sampel dengan teknik dipilih berdasarkan penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya. Sampel pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh peneliti yaitu dengan mencari *key informan* ataupun responden kunci yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

1.7.6. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen dan wawancara. Pada teknik analisis kualitatif ini, keseluruhan data yang didapatkan baik dari data Primer maupun Data Sekunder akan diolah baik dari aspek teori maupun prakteknya. Data yang didapat akan disusun secara sistematis, dikategorikan dan diklasifikasikan, kemudian antara data satu dengan data yang lain akan dihubungkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan data yang diperoleh. Proses analisis data tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.²⁷

²⁷Bambang Sunggono, 2001, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134